



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

| | | |
|------------------|---|--|
| Rapat ke | : | 9 (<i>sembilan</i>) |
| Tahun Sidang | : | 2020-2021 |
| Masa Persidangan | : | II |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan |
| Hari, Tanggal | : | Selasa, 8 Desember 2020 |
| Pukul | : | 10.00 WIB |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Pimpinan Rapat | : | Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 |
| A c a r a | : | 1. Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (<i>First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan</i>); 2. Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (<i>Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique</i>) |
| Hadir | : | 1. 32 dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, beserta jajaran |

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pada pukul 10.32 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 8 Desember 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid-19, maka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

II. KESIMPULAN

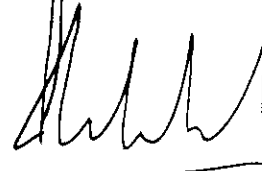
1. Komisi VI DPR RI menyetujui pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan*) dan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan*) dan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*) melalui mekanisme Peraturan Presiden.
3. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Perdagangan untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut dari Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan*) dan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*).
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian lainnya, terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat berkompetisi dengan negara lain akibat disetujuinya perjanjian ini.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI agar bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi dan penguatan produk UMKM Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.52 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI

KETUA RAPAT,



MOHAMAD HEKAL, M.B.A.

A-103